

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik secara nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui DPRD. Hal ini mendorong untuk memberdayakan masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran

mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002b). Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001; Kluvers, 2001; Jones dan Pendlebury, 1996). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow *et al*, 1988; Anthony dan Govindarajan, 1998; Halim *et al*, 2000) Hal ini yang menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Untuk menjamin dilaksanakannya anggaran dengan baik perlu dilakukan pengendalian. Hill dalam Darma (2004) menyatakan bahwa

desentralisasi, pengambilan keputusan operasi organisasi harus mengadopsi pengendalian akuntansi dan pengendalian-pengendalian yang diperlukan. Darma (2004) dalam Fitri (2005) menjelaskan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Menurut Hilmi, 2005 dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya paling sedikit mendapatkan dua hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama, mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah. Kedua, penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh sasaran anggaran dengan dampaknya, seperti penelitian Darma (2004) yang menunjukkan adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah, demikian juga penelitian Suhardito, *dkk* (2007) yang menyimpulkan kejelasan sasaran

oleh penelitian Abdullah (2004) yang mengatakan terdapat hubungan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sebaliknya, penelitian Adoe (2002) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Jumirin (2001) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Komitmen organisasi menjadi salah satu faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini didukung oleh Mahsun (2006) yang mengungkapkan bahwa salah satu elemen yang menjadi penopang terwujudnya akuntabilitas kinerja adalah komitmen sebagai wujud dari rasa kepemilikan dalam organisasi. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Darma, 2004). Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. Aparat akan lebih mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong aparat untuk mempunyai

dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

Hal lain yang mendukung penelitian ini adalah, hasil dari penelitian-penelitian yang membahas permasalahan mengenai sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja ini banyak diuji pada lokasi daerah yang sama yaitu pada kota / kabupaten propinsi DIY, dan sangat mungkin terjadi perbedaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya. Hal ini yang mendukung peneliti untuk mencoba melakukan pengujian pada lokasi pemerintah daerah yang berbeda yaitu di kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul pada penelitian ini, **PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

D Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- 1) **Kontribusi penelitian secara teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan teori mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, komitmen organisasi, dan akuntabilitas kinerja.

2) Kontribusi penelitian secara praktis :

Bagi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan pada khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota